

Krisis Demokrasi dan Tirani Meritokrasi

Otto Gusti*

Media Indonesia, 19 November 2020

<https://mediaindonesia.com/opini/362142/krisis-demokrasi-dan-tirani-meritokrasi>

Pertengahan September lalu, Michael Sandel dari *Harvard University*, Amerika Serikat, menerbitkan sebuah buku berjudul *The Tyranny of Merit* atau Tirani Meritokrasi. Buku ini merupakan tanggapan atas krisis demokrasi global yang ditandai dengan menguatnya gelombang populisme kanan. Hal ini mencapai puncaknya dengan terpilihnya Donald Trump pada pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016.

Dalam pilpres 2020 Joe Biden berhasil mengalahkan Donald Trump. Namun 70 juta atau 48% pemilih Amerika tetap menjatuhkan pilihannya pada Trump. Dukungan elektoral yang tidak kecil ini dicapai karena Donald Trump mengangkat isu kampanye rasial. Artinya, kemenangan Biden belum berarti kemenangan demokrasi berhadapan dengan populisme kanan.

Menurut Sandel, krisis demokrasi liberal tersebut berakar pada ideologi meritokrasi. Sandel menulis: “Serangan populisme adalah pemberontakan melawan tirani meritokrasi” (2020). Tirani meritokrasi dialami oleh kelompok pekerja yang merasa direndahkan oleh sistem meritokrasi dan seluruh proyek politik liberal. Sandel menggambarkan bagaimana prinsip meritokrasi menghancurkan sistem demokrasi.

Meritokrasi adalah sebuah sistem dalam masyarakat yang menjadikan prestasi individu sebagai ukuran satu-satunya dalam kehidupan sosial serta memandang tinggi- rendahnya status atau peringkat sosial atas dasar prestasi tersebut. Dalam masyarakat seperti ini orang yang menghasilkan banyak akan mendapat banyak, dan yang menghasilkan sedikit juga mendapat sedikit.

Menuju Masyarakat Meritokratis

Selama empat dekade terakhir masyarakat Amerika menjadikan prestasi sebagai episentrum gambaran dirinya. Para mahasiswa menafsirkan posisi mereka di tengah masyarakat seperti yang disuguhkan oleh *Zeitgeist* tersebut. *Zeitgeist* itu muncul dalam wajah neoliberalisme pada masa pemerintahan Ronald Reagan pada tahun 80-an. Akan tetapi kecenderungan itu baru menjadi hegemonial berkat jasa para petinggi partai demokrat seperti Bill dan Hilary Clinton serta Barack Obama.

Di sini Sandel menampilkan argumentasi pokoknya. Ia menunjukkan kepada para elit partai demokrat serta mengkonfrontasi mereka dengan pengetahuan baru bahwa mereka telah berjasa dan bertanggung jawab menghantar seorang presiden seperti Donald Trump ke puncak kekuasaan politik Amerika Serikat. Karena itu terlalu mudah untuk marah dan kecewa dengan

Trump, tanpa merefleksikan peran partai demokrat yang telah menciptakan kondisi sosial yang memuluskan jalan bagi Donald Trump. Menurut Sandel, kendatipun Donald Trump telah mengumbar kebohongan, satu hal yang otentik padanya yakni kemarahan terhadap para elit. Elit politik yang telah mendegradasi kelompok pekerja tanpa ijazah universitas.

Aspek Ideologi Meritokrasi

Sandel menunjukkan sejumlah aspek ideologis dari praktik meritokrasi. *Pertama*, berkaitan dengan cara menghadapi persoalan ketimpangan sosial. Dalam kaca mata paradigma meritokrasi, penjelasan untuk persoalan ketimpangan sosial sangat sederhana, yakni karena ada orang menghasilkan banyak, dan yang lainnya sedikit. Tafsiran ini sangat merendahkan dan menstigmatisasi orang miskin. Hillary Clinton misalnya merelativisir kealahannya pada tahun 2016 dengan mengatakan bahwa dia dipilih oleh warga USA yang menyumbangkan 80 % dari pendapatan bruto nasional. Dari perspektif meritokratis penjelasan ini masuk akal, tapi dia menghancurkan demokrasi sebab demokrasi tidak dibangun di atas prinsip prestasi tapi *one person one vote*.

Kedua, sistem pendidikan yang memperkuat ideologi meritokrasi. Sandel menunjukkan hasil pengamatannya tentang kehidupan universitas sehari-hari dan peluang di bidang pendidikan. Orang begitu yakin bahwa pendidikan merupakan solusi untuk mengatasi perangkap ketimpangan sosial. Sikap meritokratis tentang peran pendidikan ini juga ditekankan oleh sejumlah pejuang partai demokrat seperti Bill Clinton, Tony Blair dan Gerhard Schroeder di Jerman. Akan tetapi ironisnya, tiket masuk ke dunia pendidikan, terutama universitas, tidak ditentukan oleh prestasi individu anak didik, tapi oleh status ekonomi orang tua.

Ketiga, Pandangan ekonomi *mainstream* mengatakan bahwa di bursa pasar kerja hanya orang berprestasi yang dapat bertahan. Akan tetapi, apa persis yang dihasilkan oleh para banker atau komisaris BUMN yang dibayar dengan gaji paling tinggi? Mengapa seorang perawat yang mengorbankan hidupnya untuk para pasien Covid-19 dibayar lebih rendah? Bukankah ini contoh bahwa prinsip meritokrasi tak lebih dari sebuah ideologi?

Solidaritas versus Meritokrasi

Untuk keluar dari masyarakat meritokratis, Sandel membongkar asumsi-asumsi meritokratis yang telah mempolarisasi masyarakat atas *winner*s dan *loser*s. Pandemi Covid-19 adalah momen pembaharuan untuk mengevaluasi kembali martabat kerja. Pandemi ini menyadarkan kita akan ketergantungan pada pekerja murah seperti perawat, sopir truk, para pelayan di *supermarket*, pembantu rumah tangga, dan lain-lain.

Reorientasi dan evaluasi atas bobot pekerjaan adalah sebuah keniscayaan. Setiap jenis pekerjaan harus mampu menjamin hidup manusia yang bermartabat. Sandel tidak menganjurkan model egalitarianisme radikal, melainkan perlunya sistem *universal basic income* sebagai basis material bagi terciptanya solidaritas sosial. Pemberian bobot pada pendapatan perlu ditinjau kembali. Tarif pajak atas kerja harus diturunkan, sementara pajak atas pasar uang harus dinaikkan.

Persoalan seputar pengakuan akan kerja berkelindan erat dengan tanggung jawab kita satu sama lain sebagai warga negara. Untuk itu dibutuhkan sebuah kesadaran kolektif yang mewajibkan diri untuk bertanggungjawab terhadap yang lain warga sebuah komunitas. Kita harus merasa sungguh-sungguh berada “di atas perahu yang sama” (Sandel, 2020). Ini bukan sekedar jargon ideologis pada saat krisis pandemi Covid-19.

Pemikiran Sandel ini relevan untuk konteks Indonesia juga. Budaya hak-hak asasi manusia di Indonesia harus berjalan seiring dengan nilai-nilai komunitarian yang terkandung dalam agama-agama dan budaya-budaya lokal. Selain itu bangsa Indonesia juga memiliki Pancasila. Pancasila adalah *locus* kontekstualisasi konsep universal hak asasi manusia di Indonesia agar menjadi bagian dari hidup masyarakat. Pancasila juga mencegah bahaya privatisasi konsep hidup baik seperti dipraktikkan dalam masyarakat liberal.

*Dosen Filsafat di STFK Ledalero, Maumere, NTT;
alumnus program doktoral di Hochschule für Philosophie, München, Jerman.